

## **UPAYA WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) MEMBANTU MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA MELALUI COUNTRY STRATEGIC PLAN 2017-2020**

**Tunduge Vergie Marcelino<sup>1</sup>**  
**NIM. 1402045123**

### **Abstract**

*The issue of food security currently becomes one of the priority issues in socio-economic development in many countries, one of them is Indonesia. In his leadership, President Joko Widodo asked World Food Programme (WFP) for help to solve the problem of national food security. This research aims to describe the efforts that made by WFP to help Indonesia solve its national food security problems and the obstacles during it's implemented. The method used in this research is descriptive, with secondary data. Food Security Concept and Food Sovereignty Concept are used to describe the implementation of cooperation between Indonesia and WFP. The analysis figured out that in order to solve the problem of food security in Indonesia, WFP established a Country Strategic Plan program. In the CSP, WFP sets several targets which are classified into several sections and their supporting programs. During the implementation of the CSP, Indonesia was slightly helped in terms of its national food security, but in the final year of its implementation, the CSP actually encountered several obstacles in its program that caused by the Covid-19 pandemic, which resulted in the decline of Indonesia's ranking in the Global Hunger Index (IKG).*

**Keywords :** WFP, CSP, Food Security, Indonesia, Covid-19

### **Pendahuluan**

Ketahanan Pangan (*Food Security*) merupakan salah satu isu prioritas bagi pembangunan sosial ekonomi internasional dan nasional selama lebih dari 40 tahun terakhir. *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah melakukan empat kali pertemuan level dunia di Roma, Italia: *World Food Conference, 1974; World Food Summit, 1996; World Food Summit: five years later, 2002; dan terakhir World Summit on Food Security, 2009*. Setiap pertemuan menghasilkan serangkaian tujuan yang ingin dicapai FAO untuk menjamin ketahanan pangan dan setiap pertemuan pun diadakan karena tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya gagal tercapai.(www.foodsecurityindex.eiu.com)

Ketahanan pangan juga masih menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Data *APEC Food Security Road Map Towards 2020* menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) US\$ 4,050 per kapita per tahunnya ternyata masih berada di peringkat ke 62 dari 117 negara dalam urusan Indeks Kelaparan Global (IKG) tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vergiemrcl@gmail.com

Mayoritas rumah tangga Indonesia kesulitan mengakses pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum asupan energi dan protein karena terkendala pendapatan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam dimana sepanjang tahun 2017-2020 tercatat ada 13.016 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia juga semakin mempersulit rumah tangga Indonesia memenuhi pangan hariannya akibat terbatasnya aktivitas. (Eka Rastiyanto Amrullah, dkk. "Who Suffers From Food Insecurity in Indonesia?". *International Journal of Social Economics*. Vol.46. No.10, hlm. 1186-1197)

Dampak yang disebabkan Covid-19 bagi global mengakibatkan disrupsi mayor terhadap perdagangan dunia, termasuk pangan dan produk pertanian. Produksi melambat, transportasi dan logistik terhambat, distribusi terhalang karena pembatasan ekspor-impor menyebabkan harga pangan meroket. Indonesia juga ikut merasakan dampaknya dan diperparah dengan ketatnya kebijakan hambatan tarif yang diterapkan pemerintah Indonesia.

Pada periode awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia meminta bantuan WFP untuk mendukung dua dari lima prioritas ketahanan pangan yang dicantumkan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. WFP adalah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), didirikan oleh FAO pada tahun 1960, dan merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang berfokus pada masalah kelaparan dan ketahanan pangan. ([www.wfp.org](http://www.wfp.org))

Sebagai upayanya meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, WFP kemudian membuat *Country Strategic Plan* (CSP) yang disepakati tahun 2017. CSP menjadi landasan kerja WFP membantu Indonesia dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonominya, terkhusus penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat selama kurun waktu 2017-2020. CSP memperhatikan tinjauan strategis terhadap ketahanan pangan dan gizi Indonesia, meliputi respon (*feedback*) baik dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, serta mitra pembangunan. Dalam penerapannya, WFP dianjurkan untuk fokus pada dua rekomendasi kebijakan (*policy advice*), yakni pembangunan kapasitas (*capacity development*) serta pertukaran pengetahuan (*knowledge-sharing*) demi meningkatkan kualitas pemerintah terhadap ketahanan pangan, gizi, dan kesiapsiagaan bencana nasional. ([www.wfp.org](http://www.wfp.org))

CSP memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan status rawan pangan Indonesia sebanyak 9 juta jiwa hingga akhir program CSP di tahun 2020. Guna melancarkan tujuan tersebut, CSP akan menjalankan empat program untuk mencapai tiga Hasil Strategis, yaitu :

- a. Hasil Strategis 1: Mengurangi kelaparan serius per 1% setiap tahunnya, memprioritaskan masyarakat dan wilayah yang paling rawan menggunakan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*). Guna menunjang hasilnya, CSP membuat suatu program dukungan terhadap pemerintah dalam mengumpulkan sekaligus menganalisis data ketahanan pangan dan gizi untuk membuat kebijakan serta program optimum.

- b. Hasil Strategis 2: Meningkatkan persentasi konsumen diet seimbang di Indonesia hingga 92.5% agar pada tahun 2019 Indonesia dapat memenuhi pola makan nasional yang diinginkan. Program yang dipilih CSP untuk mendukungnya yakni dengan mempromosikan pola makan seimbang untuk mengatasi kekurangan gizi dan kelebihan berat badan serta meningkatkan dampak efisiensi dan gizi program perlindungan sosial nasional.
- c. Hasil Strategis 3: Menambah kapasitas logistik darurat Indonesia pada masa bencana. Rencana ini dijalankan melalui program peningkatan kewaspadaan dan respon tanggap darurat melalui pembentukan jaringan pusat logistik yang terintegrasi.(www.wfp.com)

Dengan adanya CSP sebagai rancangan peningkatan ketahanan pangan Indonesia seharusnya dapat memberikan banyak perubahan serta meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional, namun nyatanya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada sektor pangan Indonesia, bahkan menurut data dari laporan Indeks Kelaparan Global (IKG) di tahun 2020 peringkat Indonesia justru merosot ke posisi 70, atau turun delapan peringkat dari tahun sebelumnya.(www.globalhungerindex.org). Dari latar belakang tersebut tentunya ada faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya visi yang dibentuk WFP untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara dan bagaimana suatu kebijakan mengenai isu-isu pangan dibuat sehingga dapat dikorelasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

#### ***Konsep Keamanan Pangan***

Keamanan pangan didefinisikan sebagai situasi “ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi makanan mereka demi hidup sehat dan aktif”. Kerangka sistem ketahanan pangan dan gizi menggunakan perspektif negara dengan membedakan dimensi makro dan mikro dalam sistem.

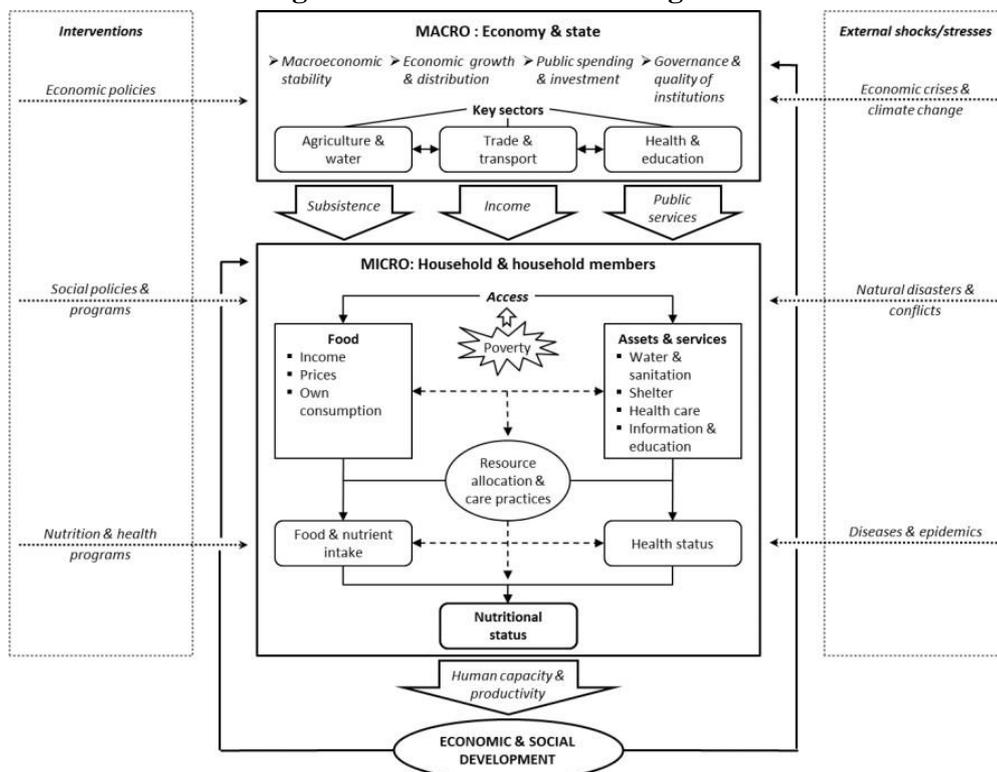
Ecker dan Breisinger menjelaskan di tingkat makro, faktor krusial stabilitas sistem ketahanan pangan dan gizi mencakup pertumbuhan ekonomi dan distribusinya, belanja negara, serta tata kelola dan kualitas kelembagaan. Sektor-sektor ekonomi dan sosial yang relevan terhadap peningkatan ketahanan pangan antara lain: sektor pertanian dan perairan; sektor perdagangan dan transportasi; dan sektor kesehatan dan pendidikan. Pada tingkat mikro, gizi anggota rumah tangga dan akses ekonomi (serta fisik) terhadap pangan juga aset dasar rumah tangga dan layanan publik mempengaruhi kondisi kesehatan individu. Kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ini dipengaruhi oleh kerentanan mata pencaharian mereka. Kerentanan menunjukkan kondisi negatif yang membatasi kemampuan individu, komunitas, dan wilayah untuk melawan proses tertentu yang melemahkan kesejahteraan mereka.( Ecker, Olivier & Clemens Breisinger. 2012. “*The Food Security System.*”.)

Adapun kesuksesan strategi untuk mencapai keberlangsungan mata pencaharian bergantung pada modal politik, yang ditentukan oleh norma, nilai, hukum, tindakan negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Modal politik merefleksikan hak

*Upaya World Food Programme (WFP) Membantu Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia Melalui Country Strategic Plan 2017-2020 (Tunduge Vergie Marcelino)*

atas sumber daya dan kemampuan menentukan nasib sendiri yang dimungkinkan oleh berbagai tingkat pengaruh proses, struktur, kebijakan, serta tindakan sukarela individu. Hak atas pangan terdiri dari hak atas pangan hasil produksi sendiri, pertukaran/perdagangan, dan klaim. Kombinasi sistem dan proses mata pencaharian memastikan masing-masing sumber ini terpenuhi, bagian terpentingnya adalah ketersediaan modal dalam kuantitas tertentu untuk menghadapi situasi tidak pasti. Salah satu variabel yang mempengaruhi sistem ketahanan pangan dan gizi yaitu guncangan eksternal di tingkat makro dan mikro sebagaimana dapat dilihat dari diagram berikut:

**Diagram Sistem Keamanan Pangan dan Gizi**



Sumber : Ecker, Olivier, dan Clemens Breisinger. 2012

Berdasarkan pada diagram di atas, dapat dipahami bahwa ketahanan pangan di suatu negara pada tingkat makro dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusinya, dan tata kelola keuangan publik. Adapun pada tingkat mikro, ketahanan pangan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan individu atau rumah tangga dalam mengakses kebutuhannya sehingga menghasilkan status kesehatan yang baik dan produktif. Tetapi, baik secara makro ataupun mikro, ketahanan pangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan seperti wabah penyakit, bencana alam, konflik negara, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan lainnya. Dari penjelasan konsep ini dapat dilihat bahwa faktor eksternal pandemi Covid-19 menjadi penghadang jalannya implementasi CSP oleh WFP.

### ***Konsep Food Sovereignty***

Menurut Edelman, konsep *Food Sovereignty* atau Kedaulatan Pangan telah menyita banyak perhatian pada tingkat politik dalam upaya perbaikan sistem pangan yang progresif selama beberapa dekade yang lalu. Secara konseptual, *Food Sovereignty* awalnya dikembangkan dalam konteks Amerika Latin dan dibahas secara publik pada *Rome World Food Conference*. Dalam konferensi tersebut, *Food Sovereignty* dimaknai sebagai hak setiap bangsa dalam menentukan sistem pangan dan kebijakannya yang terdiri dari 6 (Enam) poin rencana untuk mengakhiri kelaparan. Enam poin rencana tersebut bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap bangsa dan negara, keenam poin tersebut meliputi : (Amy Trauger. 2015. *Food Sovereignty in International Context: Discourse, Politics, and Practice of Place*)

- a. *Focuses on Food for People*, artinya *Food Sovereignty* menekankan pada aspek hak asasi manusia dalam memperoleh pangan yang layak, sehat dan sesuai dengan budaya bagi semua individu, orang-orang dan masyarakat, termasuk mereka yang kelaparan atau hidup di bawah penajahan, di area berkonflik dan terpinggirkan. *Food Sovereignty* dalam makna ini menolak pengertian bahwa pangan hanya dilihat sebagai salah satu komoditas dalam sistem agribisnis internasional.
- b. *Values Food Providers*, artinya *Food Sovereignty* menilai dan mendukung kontribusi dan kepedulian terhadap hak asasi manusia bagi laki-laki maupun perempuan, petani dan keluarganya, penggembala, nelayan, penjaga hutan, masyarakat pribumi dan pekerja bidang agrikultur dan perikanan, termasuk para imigran yang mengolah, menumbuhkan, memanen dan memproses pangan. *Food Sovereignty* dalam makna ini menolak segala kebijakan, tindakan dan program yang bertentangan dengan keberlangsungan pangan.
- c. *Localizes Food Systems*, artinya *Food Sovereignty* meletakkan produsen dan konsumen sebagai pusat pembuatan kebijakan mengenai isu-isu pangan, melindungi para produsen dari tindakan dumping terhadap pangan di pasar lokal, melindungi para konsumen dari pangan yang berkualitas buruk dan tidak sehat, dan menolak sistem, perjanjian serta praktik yang bertentangan dengan keberlangsungan pangan.
- d. *Makes Decisions Locally*, artinya *Food Sovereignty* mengontrol dan mengakses wilayah, tanah, lahan, air, benih, ternak dan populasi ikan bagi produsen pangan lokal. Sumber-sumber ini seharusnya digunakan dan dibagikan secara sosial dan lingkungan dengan melindungi keanekaragaman pangan berkelanjutan.
- e. *Builds Knowledge and Skills*, artinya *Food Sovereignty* membangun keahlian dan pengetahuan bagi produsen pangan dan organisasi yang melindungi, mengembangkan dan mengelola produksi pangan secara lokal. *Food Sovereignty* dalam makna ini menolak adanya teknologi yang merusak, mengancam dan mencemari proses genetik pengetahuan ini.
- f. *Works with Nature*, artinya *Food Sovereignty* menggunakan kontribusi ekosistem secara alamiah dan memanfaatkan metode yang bisa memaksimalkan hasilnya, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.

Berdasarkan keenam poin di atas, dapat dipahami bahwa aktor utama dalam memperjuangkan kedaulatan pangan adalah masyarakat sipil, pribumi, dan pergerakan sosial sebagai penggerak utama dibalik kemunculan atau lahirnya kebijakan mengenai isu-isu pangan. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan harus berlandaskan pada keenam poin tersebut.

Konsep ini bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai upaya WFP dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, maka keterkaitannya terletak pada program Country Strategic Plan (CSP) yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Maka dari itu keenam poin di atas akan menjadi landasan dalam menganalisis upaya yang dilakukan WFP.

### **Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana penulis menggambarkan mengenai bagaimana implemenrasi CSP oleh WFP dan hambatan yang dihadapi oleh CSP. Merujuk pada data yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang akan menekankan pada pengungkapan makna dan penjelasan dari berbagai faktor yang menghambat jalannya CSP sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti juga berupa data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari literatur-literatur pustaka serta media internet melalui situs-situs yang valid yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *library research*, yaitu berdasarkan buku-buku dan media internet melalui situs-situs yang valid, serta hasil-hasil penelitian ilmiah maupun hasil pemikiran di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik non-statistik yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu fenomena dengan cara menguraikan data-data berupa angka, tabel, grafik dan diagram menjadi kalimat.

### **Hasil Penelitian**

#### ***World food Programme (WFP)***

WFP merupakan organisasi turunan dari PBB yang memiliki tujuan dalam menangani isu krisis pangan dan mempromosikan ketahanan pangan. WFP memiliki visi, “*the world in which every man, woman and child has access all the time to the food needed for an active and healthy life*”. WFP terdiri dari perwakilan 36 negara anggotanya dan dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun yang mengemban tanggung jawab terkait administrasi organisasi dan implementasi program WFP serta kegiatan lainnya. Dalam proses penunjukannya, Direktur Eksekutif ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. (Nabila Putri. Analisa Peran World Food Programme (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea Bissau Tahun 2016-2017)

WFP tidak memiliki sumber dana independent, setiap program kemanusiaan yang dijalankan WFP bergantung pada sumbangan uang atau barang dari pihak eksternal, diantaranya dari pemerintah negara anggotanya, korporasi serta individu yang secara sukarela menyalurkan dukungannya terhadap tujuan WFP dalam mewujudkan ketahanan pangan dunia.

### ***Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia***

Dalam rentan waktu 2004-2014 Indonesia telah berhasil mengurangi setengah populasi masyarakatnya yang hidup dalam kemiskinan ekstrim ([www.wfp.org](http://www.wfp.org)). Namun hasil positif yang ditorehkan tersebut masih jauh dari kata baik karena masih ada 10.96% masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp. 326.853/per bulan, oleh karenanya melalui RPJMN 2015-2019 pemerintah bersama dengan WFP mengevaluasi pembangunan Indonesia beberapa tahun ke belakang dan membangun kerangka kerja sama baru dengan bersumber pada keadaan ketahanan pangan Indonesia beberapa tahun belakangan. .

Hal pertama yang ditinjau yakni masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Melalui pemetaan FSVA, WFP menjelaskan bahwa secara geografis kebanyakan penduduk miskin absolut berada di pulau Jawa, sedangkan miskin relatif tersebar di provinsi-provinsi Indonesia Timur diantaranya, Papua (28.5%), Papua Barat (25.4%), Nusa Tenggara Timur (22.2%), Maluku (19.2%), dan Gorontalo (17.7%) adalah lima provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi. ([www.wfp.org](http://www.wfp.org))

Berikutnya datang dari segi kesediaan logistic. Produksi bahan pangan di Indonesia terbilang baik karna hampir selalu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri meskipun masih ada beberapa komoditas yang harus diimpor dari luar karna kurangnya produksi nasional, terutama untuk produk daging, gandum dan kedelai.(Badan Ketahanan Pangan. 2015. “Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2015”)

Hal ketiga yang menjadi poin penting untuk menciptakan keamanan pangan Indonesia yakni akses distribusi komoditi pangan dari produser hingga ke tangan individu atau rumah tangga. Infrastruktur transportasi dan gudang sangat krusial terhadap ketahanan pangan, oleh karenanya pembangunan dan perbaikan jalan menjadi prioritas Indonesia tiap tahunnya, namun hingga saat ini masih banyak desa-desa di Indonesia yang sulit diakses, bahkan ada beberapa tempat yang hanya bisa diakses pada waktu tertentu saja.

Selain berfokus pada bidang produksi dan aksesnya, kondisi gizi yang diterima juga menjadi salah satu poin penting dalam mencapai ketahanan pangan. Status gizi seringkali diwakilkan lewat indikator hasil gizi pada anak di bawah usia 5 tahun (balita) yang diukur melalui tingkat kelaziman *underweight* (bobot-berdasarkan-usia), *stunting* (tinggi-berdasarkan-usia), dan *wasting* (bobot-berdasarkan-tinggi). Di tahun 2009, WHO mengklasifikasikan permasalahan malnutrisi menjadi perhatian umum yang signifikan ketika tingkat *underweight*, *stunting*, dan *wasting* di suatu negara mencapai persenan di bawah:

**Klasifikasi WHO Terhadap Signifikansi Malnutrisi**

Klasifikasi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
Dapat diterima	<10%	<20%	<5%
Serius	10-19%	20-29%	5-9%
Buruk	20-29%	30-39%	10-14%
Kritis	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber: Dewan Ketahanan Pangan. 2015.

Merujuk data yang dihimpun Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) kelaziman balita mengalami stunting sebesar 37.2%. Angka ini mengkhawatirkan mengingat klasifikasi WHO menunjukkan persen di atas 30-39 termasuk ke dalam golongan malnutrisi buruk. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan tingkat kelaziman stunting yang melebihi 50%. Bahkan ada 15 provinsi yang berada di tingkat kritis stunting. Secara umum, permasalahan stunting masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. (Suryana, Achmad. 2016. *“The State of Indonesia Food Security and Nutrition: Current Status, Challenges, and Ways Forward.” In Toward a Resilience Food and Nutrition Security in Indonesia*)

Malnutrisi terus menghambat potensi Indonesia mencapai ketahanan pangan. Lebih dari sepertiga balita mengalami stunting, di saat yang sama orang-orang dewasa menghadapi obesitas mengakibatkan pemerintah harus berhadapan dengan ‘beban-ganda’ malnutrisi. Pendekatan multi-sektoral untuk mereduksi dan mencegah kekurangan gizi di Indonesia dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, NGO, lembaga UN, masyarakat sipil, hingga sektor swasta perlu digencarkan. Koordinasi lintas sektor ini dapat mengatasi hambatan yang umumnya dialami lembaga pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan program. Program jaring pengaman sosial dapat menjadi program ampuh untuk meningkatkan keluaran gizi masyarakat. Raskin adalah contoh program signifikan jaring pengaman sosial, tapi sebagaimana yang sebelumnya telah penulis singgung, implementasinya masih harus diperbaiki.

Faktor terakhir yang menjadi sorotan penting dalam mencapai keamanan pangan yakni faktor bencana alam beserta mitigasinya. Bencana alam memiliki dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berdampak langsung terhadap sistem ketahanan pangan dan gizi Indonesia, dan menurut Badan Ketahanan Pangan, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan frekuensi bencana alam mayor tertinggi di dunia. (Dedi, Harmon. 2015. *Geografi Bencana Alam*)

Selain faktor bencana alam, wabah penyakit juga menjadi salah satu penyebab terganggunya ketahanan pangan nasional suatu negara. Seperti yang diketahui, pada akhir tahun 2019 dunia global dikejutkan dengan pandemi virus Corona (Covid-19) yang awal mula persebarannya berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Hanya dalam beberapa bulan saja, Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 219 negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Guna mengurangi angka penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan seperti membatasi kegiatan di tempat umum serta

merekomendasikan kegiatan daring serta menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terbatasnya kegiatan masyarakat, terutama para petani memberi pengaruh terhadap turunnya angka produksi di komoditas pangan. Hal serupa juga dialami oleh negara-negara lain, sehingga kegiatan impor sebagai upaya kebutuhan pangan nasional ikut terkendala karena negara lain menahan kegiatan eksportnya demi memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing. Masalah ini kemudian memberikan dampak terhadap tidak terpenuhinya kesediaan pangan nasional yang kemudian menyebabkan harga pangan naik. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2020. Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19)

### ***Implementasi Country Strategic Plan (CSP) 2017-2020.***

#### **1. Implementasi CSP Tahun 2017**

Di tahun 2017, banyak masyarakat Indonesia yang sudah berada di status ‘aman pangan’ dari pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2017-2020, CSP dimaksudkan untuk membantu meningkatkan program pemerintah yang masih berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti, peningkatan gizi dan mitigasi bencana dan untuk menunjang masalah ini, WFP mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pada skema ini, WFP bertugas mengumpulkan data-data ketahanan pangan, menganalisis, dan mempersiapkan sistem peringatan dini untuk kondisi iklim ekstrim. Data-data tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan mengalokasikan dana penanggulangan potensi kerawanan pangan. WFP juga memberikan pelatihan tentang pengawasan keamanan pangan dengan menggunakan sistem informasi geografis dan analisis data jarak jauh untuk meningkatkan pemantauan ketahanan pangan nasional serta daerah yang didokumentasikan lewat buletin triwulan. Pendekatan FSVA membantu pemerintah Indonesia menentukan secara geografis dan sektoral daerah mana saja yang berpotensi mengalami kerawanan pangan.

Di akhir tahun 2017, dilaporkan bahwa Kementerian Desa (Kemendes) telah menggunakan FSVA untuk memprioritaskan 87 daerah sebagai bagian dari program pemberdayaan desa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun turut menggunakan FSVA untuk memilah daerah mana saja yang perlu meningkatkan Program Gizi Anak Sekolah (Progas).

Progas bertujuan untuk meningkatkan konsumsi kalori dan protein anak usia sekolah. Pada tahun 2016, hanya ada 4 daerah yang disasar Progas, jumlah ini bertambah menjadi 11 di tahun 2017 dan direncanakan mencapai 64 daerah pada tahun 2018. Berdasarkan survei WFP pada kuartir keempat tahun 2017, lebih dari 1000 siswa, guru, orang tua, dan petani mendapat dampak positif dari Progas mulai dari ragam diet anak laki-laki dan perempuan, pengetahuan tentang gizi, kebersihan diri, dan performa akademis.

Selain itu, WFP bersama dengan Pulse Lab Jakarta juga mengembangkan program bernama Vulnerability Analysis and mapping Platform for Regional Emergencies (VAMPIRE) yang merupakan alat pengumpulan dan analisis data cuaca ekstrem

secara nyata atau real time. VAMPIRE sudah terpasang di Kantor Presiden Indonesia untuk membantu Presiden dan tim analis kebijakannya memonitor dampak peristiwa-peristiwa cuaca ekstrem kepada ketahanan pangan di seluruh provinsi. (World Food Programme. 2017. “*Indonesia: Annual Country Report 2017*”)

2. Implementasi CSP Tahun 2018

Tahun 2018 menjadi penanda 50 tahun kerja sama Indonesia dan WFP sekaligus tiga tahun perubahan WFP dari yang semula menjadi penyedia bantuan pangan menjadi organisasi yang lebih terlibat dalam upaya pemerintah berinvestasi di ketahanan pangan, gizi, dan kesiapsiagaan darurat. Menindaklanjuti kemajuan di tahun sebelumnya, WFP berkaca dari kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia termasuk keputusan-keputusan BMKG yang dikeluarkan untuk mengatur peran dan tanggung jawab kelompok kerja teknis antar kementerian dalam pemantauan ketahanan pangan.

Progas yang tahun sebelumnya ditargetkan mencapai 64 provinsi, pada tahun 2018 telah berjalan sebagaimana mestinya. WFP mengembangkan alat pengawasan daring atau online monitoring untuk meningkatkan jalannya Progas, dan di tahun 2018, WFP berhasil merampungkan dua studi tentang implementasi Progas.

Bersama BNPB, WFP memperkuat kapasitas daerah melalui serangkaian kursus pelatihan. Di tahun ini WFP juga menyelesaikan perangkat perencanaan Strategi Logistik dan membangun klaster logistik provinsi. Pada saat terjadi bencana alam di Sulawesi Tengah dan Selat Sunda diakhir tahun 2018, WFP juga turut membantu BNPB bersama Kemensos, dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance mempercepat pengiriman logistik dan barang bantuan lewat koordinasi, transportasi, serta penyimpanan yang lebih baik hingga tiba di lokasi kejadian. (World Food Programme. 2018. “*Indonesia: Annual Country Report 2018*”)

3. Implementasi CSP Tahun 2019

Tahun 2019, WFP melanjutkan pencapaian-pencapaiannya melalui dialog kebijakan dan penguatan kapasitas pemerintah nasional dan daerah. melalui arahan Kementerian Pertanian, WFP memfasilitasi alat perencanaan program ketahanan pangan dan gizi nasional. Kemendikbud juga ikut serta memanfaatkan FSVA untuk memetakan dan menguatkan implementasi Progas. Di saat bersamaan, sikap saling percaya antara WFP dan pemerintah semakin membaik terutama dalam mendukung komunitas yang rawan.

Pasca bantuan WFP dalam menanggulangi kondisi darurat pada bencana alam tahun 2018, pemerintah Indonesia memperluas berbagai kesempatan kerjasama dengan WFP diantaranya bersama BNPB dan juga Kemensos di tahun 2019 dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respon nasional, termasuk di antaranya, bantuan pada pembentukan Sistem Logistik dan Peralatan Nasional (Sislogpalnas), bantuan teknis untuk mengaktifkan kembali Klaster Logistik Nasional (KLN), dan

finalisasi studi Desa Tangguh Bencana. (World Food Programme. 2019. “*Indonesia: Annual Country Report 2019*”)

4. Implementasi CSP Tahun 2020

Tahun 2020 adalah tahun terakhir pengimplementasikan CSP Indonesia 2017-2020. Tahun ini menjadi yang terberat dari tahun-tahun sebelumnya karena guncangan pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap jalannya perekonomian negara. Merespon guncangan tersebut, WFP bergabung dengan Rencana Operasi Multisektor Penanganan Covid-19 sambil terus memberikan pemerintah bantuan teknis ketahanan pangan dan upaya logistik dalam memitigasi dampak dari pandemi. Meskipun lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, WFP mampu beradaptasi pada konteks pandemi dan terus bekerja melalui dialog kebijakan serta bantuan teknis kepada pemerintah demi mencapai tiga Hasil Strategis di tingkat nasional dan daerah. WFP melanjutkan penyempurnaan FSVA sebagai alat sasar bagi program-program ketahanan pangan.

Pada tahun ini, WFP memulai kolaborasi baru bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mendukung kampanye diet digital pemerintah melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Germas diharapkan mampu meningkatkan praktik konsumsi buah dan sayur di kalangan remaja. Selain itu, terkait kesehatan anak usia sekolah, WFP juga bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) dalam membangun mekanisme multi sector. WFP masih tetap mempertahankan kemitraan jangka panjangnya dengan BNPB dan Kemensos untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta respon bencana, termasuk bantuan teknis lewat pembentukan Sislogpalnas dan inisiatif Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBK).

Sepanjang pengimplementasian CSP 2017-2020, WFP berkontribusi meningkatkan kebijakan ketahanan pangan dan gizi nasional Indonesia. Hasil Studi Biaya Pangan tahun 2017 menunjukkan adanya penambahan jumlah transfer uang tunai dalam Program Makanan Pokok pemerintah. WFP berperan vital sebagai anggota KLN selama gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018. Di masa pandemi, KLN yang diaktifkan Kembali oleh WFP cukup berperan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam impor logistik dan distribusi Alat Pelindung Diri (APD). (World Food Programme. 2020. “*Indonesia: Annual Country Report 2020*”)

***Hasil Country Strategic Plan (CSP) 2017-2020***

Dilihat dari target Hasil Strategis 1 dalam upaya mengurangi kelaparan serius per 1% setiap tahunnya melalui program dukungan terhadap pemerintah dalam mengumpulkan sekaligus menganalisis data ketahanan pangan dan gizi untuk membuat kebijakan serta program optimum, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam hal penyusunan kebijakan-kebijakan ketahanan pangan dan gizi setelah dibantu WFP. Advokasi Peraturan Presiden No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi, bantuan multi sektor kepada Kemenkes, BPS, BNPB, serta institusi lainnya telah membawa kolaborasi WFP dengan pemerintah Indonesia ke tingkat yang lebih baik.

Capaian-capaian di Hasil strategis 1 juga meliputi pembuatan model kerangka analisis mulai dari perbaikan model FSVA sebagai landasan pembuatan kebijakan, hingga alat-alat pengumpul atau monitoring data seperti VAMPIRE. Di tahun 2020, konteks Pandemi Covid 19 menuntut ketersediaan data dengan kualitas tinggi dan dukungan kebijakan dari pembuat keputusan semakin tinggi. Merespon hal tersebut, WFP memobilisasi 163% anggaran dana untuk Hasil Strategis 1 ke penanganan Covid-19, terutama penyediaan bantuan bagi daerah dan masyarakat yang rawan. Selain itu, mitra WFP dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga semakin dekat meskipun bantuan teknis hanya bisa disampaikan lewat virtual karena Pandemi Covid-19.

Untuk Hasil Strategis 2 yang memiliki tujuan meningkatkan persentasi konsumen diet seimbang di Indonesia hingga 92.5% agar pada tahun 2019 Indonesia dapat memenuhi pola makan nasional yang diinginkan melalui program mempromosikan pola makan seimbang untuk mengatasi kekurangan gizi dan kelebihan berat badan. Hal ini dimulai dengan capaian temuan studi yang menunjukkan pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pola makan remaja yang buruk, padahal remaja mewakili kelompok demografi penting bagi masa depan gizi Indonesia.

Menanggapi temuan ini, WFP bersama pemerintah Indonesia membangun platform Progas yang menysasar anak sekolah. Melalui Progas, WFP berhasil mempromosikan pola makan sehat agar terhindar dari penyakit khususnya di daerah-daerah Indonesia Timur. Sayangnya, sejak Pandemi Covid-19 menyerang, WFP tidak mampu secara maksimal memfokuskan sumber dayanya untuk mencapai Hasil Strategis 2. Banyak program terhambat karena ‘virtualisasi’ Covid-19, sekolah-sekolah menutup aktivitasnya dan memaksa WFP mengatur ulang implementasi kebijakan Progas

Meski terkendala oleh pandemi, WFP tetap berupaya untuk memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini kemudian mendorong WFP menjalankan analisis *Fill the Nutrient Gap* (FNG) yang ditargetkan rampung pada tahun 2021. FNG adalah model analisis yang teruji secara global dan dirancang melibatkan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi asupan gizi masyarakat. FNG nantinya akan digunakan untuk membantu pemerintah Indonesia pada skema CSP 2021-2025.. WFP juga membantu pemerintah Indonesia mendefinisikan parameter bagi kesehatan dan gizi sekolah selama masa bencana, termasuk pandemi.

Terakhir, Hasil strategis 3: Menambah kapasitas logistik darurat Indonesia pada masa bencana, program 4: Meningkatkan kewaspadaan dan respon tanggap darurat melalui pembentukan jaringan pusat logistik yang terintegrasi. Masih sejalan dengan SDG 2.1, yaitu akses pangan bagi semua orang, namun dalam konteks bencana. Di aspek ini, WFP mulanya berfokus pada permasalahan bencana alam yang rajin mengganggu ketahanan pangan Indonesia. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai instansi pemerintah diarahkan ke permasalahan kesiapsiagaan darurat bencana. Perencanaan Strategis Logistik, pembangunan klaster logistik provinsi, pembentukan Sislogpalnas, dan revitalisasi KLN merupakan kemajuan-kemajuan selama tiga tahun pertama CSP 2017-2020.

Pandemi Covid-19 merubah prioritas WFP, Hasil strategis 3 mendapat porsi sebesar 66% di tahun 2020. Walaupun pada akhirnya upaya-upaya yang dapat dilakukan tidak mengeluarkan biaya besar karena keterbatasan aktivitas selama masa Pandemi Covid-19. Ada empat capaian penting WFP di Hasil strategis 3 pada tahun 2020, yakni : (1) Terbitnya pedoman dan surat keputusan pemerintah untuk mendukung implementasi KLN; (2) Penguatan KLN dalam merespon Pandemi Covid-19; (3) Penguatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan; (4) pembentukan klaster logistik provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pengalaman di tahun 2020, WFP merencanakan penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kesiapsiagaan dan tanggapan pemerintah bersama dengan institusi kesehatan terhadap situasi pandemi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa selama empat tahun implementasi CSP, WFP telah mencapai target yang dikelompokkan kedalam Hasil Strategi 1, 2, dan 3 melalui beberapa program. Namun diakhir tahun pengimplementasian CSP, WFP harus menghadapi kendala eksternal yang menghambat penyelesaian program CSP.

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan karena peristiwa pandemi Covid 19. Masing-masing target Hasil strategis harus mengalami penyesuaian untuk menguatkan respon pemerintah Indonesia pada situasi krisis pandemi. Hal ini diperburuk dengan kegagalan respon pemerintah Indonesia khususnya di bidang ekonomi selama pandemi Covid-19. Tidak heran jika posisi Indonesia melorot ke angka 70 di tengah situasi sulit. Masalah pandemi yang dihadapi sistem ketahanan pangan dan gizi Indonesia memaksa perubahan gaya hidup masyarakat, membatasi daya beli mereka, dan mempersulit akses pangan masyarakat Indonesia.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Amy Trauger. 2015. *Food Sovereignty in International Context: Discourse, Politics, and Practice of Place*. Routledge : New York,

Dedi, Harmon. 2015. *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ecker, Olivier & Clemens Breisinger. 2012. "The Food Security System." International Food Policy Research Institute.

Suryana, Achmad. 2016. "The State of Indonesia Food Security and Nutrition: Current Status, Challenges, and Ways Forward." *In Toward a Resilience Food and Nutrition Security in Indonesia..*

**Internet**

*Global Food Security Index (GFSI) 2019*, tersedia di <https://foodsecurityindex.eiu.com/>

*World Food Programme. t.t. "Overview | World Food Programme."* Tersedia di <https://www.wfp.org/overview>.

**Jurnal/Skripsi/Laporan**

Eka Rastiyanto Amrullah, dkk. "Who Suffers From Food Insecurity in Indonesia?". *International Journal of Social Economics*. Vol.46. No.10, hlm. 1186-1197

Nabila Putri Hartadi. *Analisa Peran World Food Programme (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea-Bissau Tahun 2016-2017.pdf* tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49446/1/FIRSTY%20NABILA%20PUTRI%20HARTADI.FISIP.pdf>

Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2020. *Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19.pdf* tersedia di <http://tnp2k.go.id/download/92111PB8%20Ketahanan%20PanganFA-Jul2020.pdf>

World Food Programme. 2017. "Indonesia: Annual Country Report 2017"

World Food Programme. 2018. "Indonesia: Annual Country Report 2018"

World Food Programme. 2019. "Indonesia: Annual Country Report 2019"

World Food Programme. 2020. "Indonesia: Annual Country Report 2020"